Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)

Awaliya Safithri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur
awaliyasafithri13@gmail.com

Hasbi Ash Shiddiqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Baletbaru, Sukowono, Jember, Jawa Timur
Hasbiashshiddiqi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terhadap perlindungan hak sipil pasangan dan anak, serta keutuhan keluarga dari perspektif maqasid syariah. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan beda agama sering mengalami kesulitan untuk dicatat secara resmi, yang berdampak pada status hukum pasangan dan hak-hak sipil mereka, seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis maqasid syariah yang terangkum dalam *kulliyatul-khomsah*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam dan praktisi hukum, serta analisis literatur yang relevan terkait peraturan perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan beda agama untuk mencatat perkawinan mereka menyebabkan hilangnya beberapa hak sipil yang penting, dan ini berdampak pada keutuhan keluarga mereka. Dari perspektif maqasid syariah, pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk melindungi hak sipil dan keturunan yang sah, memastikan stabilitas keluarga, dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Signifikansi penelitian ini terletak pada rekomendasinya bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif terhadap pencatatan perkawinan beda agama, yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai agama, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak sipil dalam kerangka maqasid syariah

Kata kunci: *Pencatatan, Perkawinan, Beda Agama, Maqasid Syariah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of interfaith marriage registration in Indonesia on the protection of civil rights of couples and children, as well as family integrity from the perspective of maqasid sharia. In the national legal system, interfaith marriages often have difficulty being officially registered, which has an impact on the legal status of couples and their civil rights, such as inheritance rights, child custody rights, and access to public services. This study uses a descriptive qualitative method with a maqasid sharia analysis approach summarized in kulliyatul-khomsah. Data were collected through in-depth

interviews with Islamic legal experts and legal practitioners, as well as analysis of relevant literature related to marriage regulations in Indonesia. The results of the study indicate that the inability of interfaith couples to register their marriages results in the loss of several important civil rights, and this has an impact on the integrity of their families. From the perspective of maqasid sharia, marriage registration is an important step to protect civil rights and legitimate descendants, ensure family stability, and provide legal protection for couples and children. The significance of this study lies in its recommendation for policy makers to create more inclusive regulations for the registration of interfaith marriages, which not only prioritize religious values, but also fulfill the principles of justice and protection of civil rights within the framework of maqasid sharia

Keywords: *Registration, Marriage, Interfaith, Maqasid Sharia.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting sehingga dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan putusan lembaga peradilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal ini.

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format *Turabian Style*. Pada 17 Juli 2023 lalu Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri tidak lain untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Polemik tentang keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut sebenarnya telah lama terjadi. Sebab, selain karena tidak

adanya larangan secara tegas mengenai perkawinan beda agama dan keyakinan, peraturan perundang-undangan yang ada selama ini juga masih memberikan celah hukum kepada pasangan beda agama serta keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan terhadap keabsahan pencatatan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.¹

Celah hukum yang selama ini dijadikan landasan oleh pasangan beda agama dan keyakinan untuk dapat memperoleh pengakuan tentang keabsahan dan mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan itu terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan perkawinan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas” Namun, sejak lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi

¹ Ubed Bagus Razali, “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan,” *Mahkma Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama*, 2023,

<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mengakhiri-Polemik-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama-Dan-Keyakinan-Oleh-Ubed-Bagus-Razali-S-H-I-S-H-7-8>.

Kependudukan celah hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan untuk memperoleh keabsahan tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan menjadi semakin terbuka lebar. Sebab, dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan: “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, dan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa: “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.²

Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas sangat bertentangan (contradiction in terminis) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sebab, di dalam perkawinan itu terdapat kepentingan serta tanggung jawab yang saling berkaitan antara agama dan negara. Relasi antara agama serta negara dalam hukum perkawinan adalah agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Padahal, salah satu syarat dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah: “mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”. Selain itu, penjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan yang di dalam lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 178, menyatakan: “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

² Vivia Damayanti, Isti Sulistyorini, And Sri Pujiningsih, “The Analysis Of Interfaith Marriage Was Reviewed By Law Number 1 Of 1974 (As Amended By Law Number 16 Of 2019) And Law Number 23 Of,” *Proceeding International*

Conference Faculty Of Law 2022 “ Society 5.0 In The Concept Of The Modern Rule Of Law” 1, No. 1 (2022): 145–57.

³ Desimaliati Desimaliati, “Legality Of Registration For International Religious Marriage

Upaya untuk menutup celah hukum perkawinan beda agama dan keyakinan itu sebelumnya pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUUXX/2022, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas telah menolak untuk memberikan landasan konstitusionalitas terhadap perkawinan beda agama dan keyakinan. Meskipun, kedua putusan itu hanya menguji norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun karena pencatatan perkawinan adalah akibat hukum dari adanya pengakuan mengenai sah atau tidaknya perkawinan, yang sebelumnya telah dinyatakan oleh MK bahwa konstitusionalitas perkawinan yang sah ialah yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, maka kedua putusan MK itu telah menutup celah dan

upaya hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan untuk mendapatkan pengakuan tentang keabsahan pencatatan perkawinannya, termasuk melalui penetapan pengadilan. Perkawinan ialah bagian dari bentuk ibadah dan ekspresi beragama. Sehingga, perkawinan dapat dikategorikan sebagai forum eksternum, dimana negara dapat campur tangan, seperti dalam pengelolaan zakat dan haji.⁴

Meskipun demikian, peran negara bukan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianutnya. Meskipun perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diakui dan dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia. Namun, HAM yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila sebagai identitas bangsa. Walaupun Jaminan perlindungan HAM secara universal yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama

Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia,” *Cepalo* 6, No. 2 (2022): 77–90,
<https://doi.org/10.25041/Cepalo.V6no2.2704>.

⁴ Razali, “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan.”

negaranegara di dunia, tetapi penerapan HAM tersebut di tiap-tiap negara disesuaikan dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya masyarakat di masing-masing negara. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, maka segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara termasuk menyangkut urusan perkawinan harus tunduk dan taat serta tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Keabsahan perkawinan adalah domain agama yang memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh

agama tersebut. Pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁶

Dengan demikian, maka keberadaan putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUUXX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tersebut telah memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan hingga direvisinya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini memberikan celah hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan keyakinan untuk mendapat pengakuan mengenai keabsahan pencatatan perkawinannya melalui

⁵ Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, And Samira Echaib, “Legal Status Of Interfaith Marriage In Indonesia And Its Implications For Registration,” *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System* 2, No. 3 (2022): 167–77, <https://doi.org/10.53955/Jhcls.V2i3.43>.

⁶ Muhammad Aziz Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.

penetapan pengadilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi peraturan perundang-undangan ini sangat penting dan juga mendesak untuk segera dilakukan, sebab selain untuk terciptanya ketertiban hukum, revisi ini juga dapat mengakhiri polemik mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁷

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi dilema hukum dan sosial, terutama dalam hal perlindungan hak sipil dan keutuhan keluarga. Di satu sisi, pencatatan resmi penting untuk menjamin hak-hak sipil pasangan dan anak, termasuk hak waris dan status hukum lainnya. Di sisi lain, hukum Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai perkawinan beda agama, terutama dalam konteks perlindungan agama dan keturunan (*hifz al-din*) dan (*hifz al-nasl*). Melalui perspektif maqasid syariah, penelitian ini bertujuan menganalisis pencatatan perkawinan beda agama untuk memahami

dampaknya pada hak sipil dan keutuhan keluarga.⁸

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan serta bagaimana dampaknya terhadap keutuhan keluarga dan bagikan fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif Hak asasi manusia dan *Maqasid Syariah*

1.3 Metode Penelitian⁹/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami fenomena pencatatan perkawinan beda agama dari perspektif maqasid syariah.¹⁰ Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu-isu terkait hak sipil dan keutuhan keluarga secara mendalam, serta mengkaji bagaimana *maqasid syariah* terutama tujuan perlindungan

⁷ Nurul Fazri Elfikri Alvid Cesariansyah Jusuf, Nirwan Junus, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga," *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 7 (2024): 565–70.

⁸ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, And Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*

13, No. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

⁹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

¹⁰ Mudjia Rahardjo, "Penelitian Kualitatif Selayang Pandang," *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis*, 2015, 8–14, <http://repository.uin-malang.ac.id/2412/>.

agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) mendukung atau menentang praktik pencatatan perkawinan beda agama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang meliputi ahli hukum Islam, akademisi syariah, serta praktisi hukum yang berpengalaman dalam isu perkawinan beda agama. Data sekunder diambil dari literatur terkait, seperti kitab-kitab fikih klasik, fatwa, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-tema kunci, seperti hak sipil pasangan, keutuhan keluarga, serta prinsip-prinsip maqasid syariah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan berbagai pandangan dan data yang ada untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan komprehensif. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diterapkan dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk perlindungan hak sipil dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format *Turabian Style*.

Problematika Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Problematika hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi isu yang rumit karena melibatkan ketegangan antara aturan agama, hukum negara, dan hak-hak sipil pasangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan persamaan agama sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, menyebabkan pasangan beda agama sulit mendapatkan pengakuan resmi. Akibatnya, status hukum mereka sebagai suami-istri dan

perlindungan hak-hak sipil menjadi terancam.¹¹

Tidak adanya pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama berdampak serius pada hak-hak sipil mereka. Hak waris, hak asuh anak, dan akses layanan publik yang memerlukan bukti pernikahan resmi menjadi sulit diakses oleh pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tak tercatat juga mengalami kerentanan status hukum, yang bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil, seperti hak waris dan akta kelahiran yang sah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pasangan dan anak-anak yang mereka besarkan.¹²

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang

berbeda. Akan tetapi sebagaimana yang telah diketengahkan di muka, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia muncul pula akibat penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran pasal ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹³

Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal

¹¹ Alif Yusroni, “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo,” *Carbohydrate Polymers* 6, No. 1 (2019): 5–10, [Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/18780/](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/18780/).

¹² Fathul M U In, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” 2, No. 1 (2022): 13–29.

¹³ S Sadari, “Founding Father Perumusan Dimensi Moderasi Fiqh Islam: Studi Hukum Kelurga Islam Bidang Perkawinan Di Indonesia Dari Orde Baru Menuju Pasca ...,” *Moderation/ Journal Of Islamic Studies* ..., 2021, [Http://Journal.Adpetikisindo.Or.Id/Index.Php/Moderation/Article/View/17](http://Journal.Adpetikisindo.Or.Id/Index.Php/Moderation/Article/View/17).

tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama. Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan.¹⁴

Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian meskipun suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut akan tetap sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya

masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama.¹⁵

Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan

¹⁴ Christine Lucia Mamuya And Abdus Sair, "Toleransi Masyarakat Islam-Kristen Madura Di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember," *Dimensi: Journal Of Sociology* 10, No. 2 (2017): 5–15,

<https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Dimensi/Article/View/3761>.

¹⁵ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Mitra Abadi Press, 2014).

masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya.¹⁶

Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, dimana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut. Kendati demikian, terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama.¹⁷

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan. Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.¹⁸

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk

¹⁶ Jefry Tarantang And Jefry Tarantang, "Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Transformatif* 2, No. 1 (2018): 315, <https://doi.org/10.23971/Tf.V2i1.882>.

¹⁷ Alvid Cesariansyah Jusuf, Nirwan Junus, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga."

¹⁸ Nur Fika Palilati, "Review Of Compilation Of Islamic Law Against Interfaith Marriage Prohibition Results In The Registration Of Marriages," *Estudiante Law Journal* 4, No. 2 (2022): 600–611, <https://doi.org/10.33756/Eslaj.V4i2.19012>.

menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya. Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya.¹⁹

Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyasati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang diakui di

Indonesia juga dapat mendorong salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik untuk menjadi penganut agama tersebut untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain merupakan bentuk penyelundupan hukum, praktik ini juga berpotensi mencederai jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik pula.²⁰

Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda agama tersebut harus berpindah agama bukan berdasarkan keinginan dan kehendaknya, melainkan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif untuk melancarkan perkawinan. Dewasa ini, terdapat perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang

¹⁹ Institut Pesantren, K H Abdul, And Chalim Mojokerto, "Interfaith Marriage Registry In Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 377–405.

²⁰ Alvid Cesariansyah Jusuf, Nirwan Junus, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga."

menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, contohnya melahirkan praktik penyelundupan hukum.²¹

Selain itu dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi sesama warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut, pada dasarnya

Mahkamah Agung menguatkan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif Indonesia, termasuk hak untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.²²

Hal ini sejalan dengan perlindungan hak untuk menikah dan membentuk keluarga serta hak untuk memeluk agama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi setiap manusia tanpa dibatasi oleh agama. Kendati demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986 belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam putusnya Mahkamah Agung telah memberikan

²¹ Yoyo Hambali, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Mas Lahah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Maslahah* 6, No. 2 (2015): 39–74.

²² M. Yusrizal Adi Syahputra, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi," *Mercatoria* 4, No. 2 (2011).

ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, namun Kantor Catatan Sipil masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Alasannya tak lain dan tak bukan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.²³

Dengan demikian, dibutuhkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan beda agama, karena lapangan hukum ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang perlindungannya menjadi tanggung jawab negara serta rawan terjadi pelanggaran terhadapnya. Kaitannya dengan ketahanan keluarga, keluarga merupakan sebuah sistem sosial paling kecil yang berperan penting agar tercapainya kesejahteraan penduduk sebagai sebuah tujuan dari pembangunan. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 bahwa “Keluarga memiliki 8 fungsi yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik yaitu: fungsi keagamaan; fungsi sosial budaya; fungsi cinta kasih; fungsi perlindungan; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi dan pendidikan; fungsi ekonomi; dan fungsi pembinaan lingkungan”.²⁴

²³ Alvid Cesariansyah Jusuf, Nirwan Junus, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga.”

²⁴ Afif Muamar, “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi

Ketika fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka keluarga akan mampu memperkuat ketahanan keluarganya. Dalam mengukur tingkat ketahanan keluarga, maka penelitian ini akan menggunakan konsep keluarga yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”. Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah keluarga yang memiliki mampu mengelola sumber daya keluarga, mengatur dan mengatasi permasalahan agar tercapai kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan itu, keluarga dianggap tingkat ketahanan keluarganya tinggi apabila memiliki tiga komponen laten ketahanan keluarga, yaitu: Ketahanan fisik

Buatan Manusia: Antara Uu Perkawinan Dan Fikih Konvensional,” *Jurnal Al-Ahwal* 6, No. 1 (2013).

keluarga, Ketahanan sosial keluarga, Ketahanan psikologis keluarga.²⁵

Selain konflik internal keluarga, hal yang sering muncul adalah konflik yang berasal dari luar seperti pertentangan dari orang tua dan saudara serta tetangga. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit perilaku yang pasca melakukan perkawinan ia berpindah agama ke agama semula. Meskipun berbeda agama dengan pasangannya banyak dari mereka yang bertahan. Adapun beberapa pernyataan menurut wawancara Alvid Cesariansyah Jusuf dan Nirwan Junus dengan Drs. H. Arifin Adam selaku Kepala KUA Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo tentang Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga yaitu:²⁶

1) Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) Akibat hukum terhadap status perkawinan Pasal 2 ayat 1 Undang-

²⁵ Tomi Jaffisa Et Al., “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat,” *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan*

Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa 8, No. 8 (2019): 89–94.

²⁶ Alvid Cesariansyah Jusuf , Nirwan Junus, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga.”

undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

3) Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara

Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur

dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Analisis Maqasid Syariah terhadap Perkawinan Beda Agama

Dilihat dari Konsep *Maqashid Syari'ah* dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep *Maqashid Syari'ah* ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki. *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dan Hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya adalah metode ijtihad (Al-Raysuni and Barut 2000). Jika diterapkan dalam kasus nikah beda agama maka;

Pertama adalah akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Konsep pemeliharaan pemeliharaan agama adalah tujuan utama Hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Seharusnya, bagi 2 orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan dapat menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat dari pada masa lajangnya. Hal tersebut didasari atas Hadis Nabi yang sering didengar mengatakan bahwa “*Nikah itu adalah Sunnaku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golonganku*”. Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.²⁷

Kedua adalah konsep pemeliharaan jiwa. Konsep ini hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih dan terkontaminasi oleh sesuatu apaun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang kemudian melebur menjadi satu

²⁷ Mohammad Nurun Nada, “Konstruksi Maqasid Syariah Dalam Relasi Nalar Fikih Dan Tasawuf Studi Pemikiran Abd. Wahab Asy-Sya’rani,”

2019, 180, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37156/>.

untuk mencapai tujuan yang sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika menikah beda agama ini adalah jiwa yang tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran dan pastinya beda dalam praktiknya. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud. Selain itu, semua perbedaan itu dapat membuat jiwa menjadi lemah terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah. Dengan itu pula akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang didapatnya.²⁸

Ketiga yaitu bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak lagi

manfaat yang diperoleh selain mudarat yang besar.²⁹

Selain dari tiga konsep di atas, bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 9 yang berbunyi:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Konsep yang terakhir yaitu pemeliharaan harta yang juga berlawanan dengan konsep menikah beda agama. Seseorang yang menikah beda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan pemeliharaan harta tidak dapat terlaksana. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan

²⁸ Fauzi, Gemilang, And Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.”

²⁹ Fauzi, Gemilang, And Indrajaya.

keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Bukankah dengan pernikahan itu seseorang dapat meningkatkan perekonomian, yang salah satunya melalui adanya keterikatan saling mewarisi?. Dengan demikian, menikah dengan perbedaan agama memiliki mudarat yang lebih besar hingga dijalankannya perintah pembagian waris di saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.³⁰

Pada fenomena sosial terdapat perkawinan yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ayu Kartika Dewi yang menikah berbeda agama dengan seorang pria yang bernama Gerald Sebastian di Gereja Katedral Jakarta pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 menuai pro dan kontra. Sebagai mana yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila menurut agama masing-masing. Artinya perkawinan itu memang perkawinan yang dikonotasikan secara tegas dan jelas berbeda agama tidak diperbolehkan. Amirsyah Tambunan juga

menegaskan “maka harus dengan yang seagama” (CNN Indonesia 2022).³¹

Menurut N.Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dikuti oleh Fauzi Dkk menyebutkan bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 jelas, perkawinan itu seagama, bukan berbeda agama. Disisi lain, jika kita lihat pada konsep hukum itu sendiri, maka hukum bukan hanya cerminan dari perwujudan kehidupan masyarakat, yaitu hanya tunduk pada pengaturan tingkah laku yang ada dalam masyarakat saja, akan tetapi juga tunduk pada aturan sang pencipta manusia, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber kehidupan. dari semua sumber milik hukum. Maka manusia itu tidak bisa hanya patuh kepada manusia lainnya, tetapi juga tunduk kepada penciptanya. Oleh karena itu, selain memperhatikan norma-norma sosial, hukum yang baik juga harus menjunjung tinggi dogma-dogma transenden yang dituangkan dalam hukum yang mengikat.³²

Pemaparan di atas menunjukan bahwa perkawinan beda agama memiliki banyak sisi negatif (*mudharat*) dari pada

³⁰ Fauzi, Gemilang, And Indrajaya.

³¹ Fauzi, Gemilang, And Indrajaya.

³² Fauzi, Gemilang, And Indrajaya.

sisi positifnya (*masalah*). Maka menjadi wajar banyak ormas Islam tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama. Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwanya Nomor: 4/MunasVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menetapkan bahwa nikah beda agama haram dan tidak sah (Fatwa MUI, 2005). MUI juga mengambil kaidah fiqih untuk menghilangkan kerusakan dari pada mengambil manfaatnya, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) itu lebih utama dari pada medatangkan manfaat (*maslahah*)”.³³

III. KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

Pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan ketegangan antara aturan agama, hukum negara, dan hak-hak sipil pasangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengakui secara resmi perkawinan beda agama. Akibatnya, pasangan beda agama kesulitan mendapatkan pengakuan legal sebagai suami-istri dan berpotensi kehilangan hak-hak sipil mereka. Status hukum anak-anak dari perkawinan tak tercatat juga menghadapi tantangan dalam hak waris dan administrasi seperti akta kelahiran. Peraturan ini, yang diperkuat oleh Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, pada dasarnya menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada agama masing-masing, yang dalam banyak agama di Indonesia tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Ini membuat banyak pasangan harus memilih antara berpindah agama (kadang-kadang untuk sementara waktu) atau melangsungkan pernikahan di luar negeri dan melaporkannya untuk dicatat di Indonesia. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400K/Pdt/1986 menyatakan bahwa perkawinan beda agama sebenarnya tidak dilarang secara tegas oleh UU Perkawinan.

³³ Fauzi, Gemilang, And Indrajaya.

Masih ada kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Akibatnya, Kantor Catatan Sipil kerap menolak pencatatan perkawinan beda agama jika dianggap tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu ada regulasi yang secara tegas mengatur hak-hak pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Hal ini penting demi melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Perkawinan beda agama dalam perspektif *maqasid syariah* dinilai membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Konsep ini bertentangan dengan lima tujuan utama *maqasid syariah*, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Pertama*, dalam aspek pemeliharaan agama, pernikahan beda agama dapat melemahkan keimanan karena perbedaan keyakinan yang dapat mengancam keharmonisan keluarga. *Kedua*, konsep pemeliharaan jiwa menyarankan bahwa penyatuan jiwa dalam pernikahan seharusnya mendukung tujuan bersama, yang sulit dicapai dalam

pernikahan beda agama. *Ketiga*, pemeliharaan akal menjadi sulit karena cinta dapat mengaburkan pertimbangan logis dan keimanan. *Keempat*, pemeliharaan keturunan terancam karena anak-anak dari pernikahan beda agama mungkin mengalami kebingungan identitas. *Kelima*, pemeliharaan harta terganggu karena pasangan beda agama tidak bisa saling mewarisi, sehingga hak waris anak-anak bisa terabaikan. MUI dan ormas-ormas Islam di Indonesia telah menolak pernikahan beda agama, menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang mungkin didapat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alvid Cesariansyah Jusuf , Nirwan Junus, Nurul Fazri Elfikri. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 7 (2024): 565–570.
- Christine Lucia Mamuaya, And Abdus Sair. “Toleransi Masyarakat Islam-Kristen Madura Di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.” *Dimensi: Journal Of Sociology* 10, No. 2 (2017): 5–15. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3761>.
- Damayanti, Vivia, Isti Sulistyorini, And Sri Pujiningsih. “The Analysis Of Interfaith Marriage Was Reviewed By Law Number 1 Of 1974 (As Amended By Law Number 16 Of 2019) And Law Number 23 Of.” *Proceeding International Conference Faculty Of Law 2022 “ Society 5.0 In The Concept Of The Modern Rule Of Law”* 1, No. 1 (2022): 145–157.
- Desimaliati, Desimaliati. “Legality Of Registration For International Religious Marriage Based On Court Decisions According To Law And Regulations In Indonesia.” *Cepalo* 6, No. 2 (2022): 77–90.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, And Darmawan Tia Indrajaya. “Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, No. 1 (2023): 74.
- Hambali, Yoyo. “Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Studi Atas Konsep Mas Lahah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Maslahah* 6, No. 2 (2015): 39–74.
- In, Fathul M U. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” 2, No. 1 (2022): 13–29.
- Islamy, Muhammad Aziz Athoillah. “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, No. 2 (2022): 94–113.
- Jaffisa, Tomi, M Ap, Mirja Huwanji, Ilmu Adm Publik, Fakultas Isip, And Universitas Dharmawangsa. “Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat.” *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa* 8, No. 8 (2019): 89–94.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayah, And Samira Echaib. “Legal Status Of Interfaith Marriage In Indonesia And Its Implications For Registration.” *Journal Of Human Rights, Culture And Legal System* 2, No. 3 (2022): 167–177.
- Muamar, Afif. “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara Uu Perkawinan Dan Fikih Konvensional.” *Jurnal Al-Ahwal* 6, No. 1 (2013).
- Nada, Mohammad Nurun. “Konstruksi Maqasid Syariah Dalam Relasi Nalar Fikih Dan Tasawuf Studi Pemikiran Abd. Wahab Asy-Sya’rani” (2019): 180. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37156/>.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press, 2014.
- Palilati, Nur Fika. “Review Of Compilation Of Islamic Law Against Interfaith Marriage Prohibition Results In The Registration Of Marriages.” *Estudiante Law Journal* 4, No. 2 (2022): 600–611.
- Pesantren, Institut, K H Abdul, And Chalim Mojokerto. “Interfaith Marriage Registry In Indonesia Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Al-‘Adalah: Jurnal*

- Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 377–405.
- Rahardjo, Mudjia. “Penelitian Kualitatif Selayang Pandang.” *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis* (2015): 8–14. [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/).
- Razali, Ubed Bagus. “Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan.” *Mahkma Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama* (2023). [Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mengakhiri-Polemik-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama-Dan-Keyakinan-Oleh-Ubed-Bagus-Razali-S-H-I-S-H-7-8](https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Mengakhiri-Polemik-Pencatatan-Perkawinan-Beda-Agama-Dan-Keyakinan-Oleh-Ubed-Bagus-Razali-S-H-I-S-H-7-8).
- Sadari, S. “Founding Father Perumusan Dimensi Moderasi Fiqh Islam: Studi Hukum Keluarga Islam Bidang Perkawinan Di Indonesia Dari Orde Baru Menuju Pasca” *Moderation/ Journal Of Islamic Studies ...* (2021). [Http://Journal.Adpetikisindo.Or.Id/Index.Php/Moderation/Article/View/17](http://Journal.Adpetikisindo.Or.Id/Index.Php/Moderation/Article/View/17).
- Syahputra, M. Yusrizal Adi. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Mercatoria* 4, No. 2 (2011).
- Tarantang, Jefry, And Jefry Tarantang. “Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.” *Transformatif* 2, No. 1 (2018): 315.
- Yusrini, Alif. “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” *Carbohydrate Polymers* 6, No. 1 (2019): 5–10. [Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/18780/](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/18780/).